

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

NOMOR 19 TAHUN 2018

TENTANG

KOORDINATOR PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK
NEGARA UNIT KERJA ESELON II TAHUN ANGGARAN 2018 DI LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

SEKRETARIS UTAMA KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara dan efektifitas dalam Pengelolaan dan Penatausahaan Milik Negara dipandang perlu menunjuk Koordinator Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara Unit Kerja Eselon II Tahun Anggaran 2018 di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Koordinator Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara Unit Kerja Eselon II Tahun Anggaran 2018 di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5533);
4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
 6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG KOORDINATOR PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA UNIT KERJA ESELON II TAHUN ANGGARAN 2018 DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Koordinator Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara Unit Kerja Eselon II Tahun Anggaran 2018 di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Koordinator Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pendataan, identifikasi dan inventarisasi Barang Milik Negara yang ada di organisasi LKPP;
2. Menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara di Unit Kerja Eselon II;
3. Melaporkan pembelian belanja modal sesuai dengan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara;
4. Melaporkan kondisi barang dan pemindahtanganan penggunaan Barang Milik Negara di Unit Kerja Eselon II; dan
5. Melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan penatausahaan Barang Milik Negara.

- KETIGA : Masa kerja Koordinator Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan bulan Desember Tahun 2018.
- KEEMPAT : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Koordinator Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara Unit Kerja Eselon II Tahun Anggaran 2018 di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diberikan honorarium berdasarkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Negara Unit Kerja Eselon II Tahun Anggaran 2018 di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang besarnya sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2018.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 21 Maret 2018
SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

SALUSRA WIDYA

Tembusan disampaikan kepada:

1. Kepala Biro Umum dan Keuangan;
2. PPK Biro Umum dan Keuangan;
3. Bendahara Pengeluaran LKPP; dan
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG KOORDINATOR
PENGELOLAAN DAN
PENATAUSAHAAN BARANG MILIK
NEGARA UNIT KERJA ESELON II
TAHUN ANGGARAN 2018 DI
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 19 TAHUN 2018

TANGGAL : 21 Maret 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BESARAN HONORARIUM
KOORDINATOR PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK
NEGARA UNIT KERJA ESELON II TAHUN ANGGARAN 2018 DI LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No	Kedudukan dalam Tim	Nama	Unit Kerja Eselon II	Honorarium (Rp)
1	Penanggung Jawab	Dwi Wahyuni Kartianingsih	Biro Umum dan Keuangan	450.000
2	Ketua	Moch Zaini	Biro Umum dan Keuangan	400.000
3	Sekretaris	Muhammad Irsyan Halomoan	Biro Umum dan Keuangan	300.000
4	Anggota	1. Satriyo Wibowo	Biro Umum dan Keuangan	300.000
		2. Intan Dana Lestari	Biro Umum dan Keuangan	300.000
		3. Angga Fariz Prayoga	Biro Umum dan Keuangan	300.000
		4. Nur Hartoyo	Biro Umum dan Keuangan	300.000
		5. Rati Karimah	Biro Umum dan Keuangan	300.000
		6. Kurnia Sari	Biro Umum dan Keuangan	300.000
		7. Adi Irawan	Biro Umum dan Keuangan	300.000
		8. Mukti Herlambang	Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata laksana	300.000
		9. Rasmita Juliana Sitepu	Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian	300.000
		10. Andi Darmawan	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum	300.000

	11. Lailatul Mufarokah	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus	300.000
	12. M Hanif Firnanda	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional	300.000
	13. Adi Afrianto	Direktorat Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Pengadaan	300.000
	14. Lulu Haryani	Direktorat Pengembangan Sistem Katalog	300.000
	15. Doddy PAscal	Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	300.000
	16. Verawaty Simorangkir	Direktorat Pengembangan Profesi	300.000
	17. Rizky Arimawati	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa	300.000
	18. Dwi Hendri Cahyadi	Direktorat Sertifikasi Profesi	300.000
	19. Edi Kristiyanto	Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah I	300.000
	20. Astri Erviana	Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II	300.000
	21. Taufikurrohman	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum	300.000
	22. Sazzali	Inspektorat	300.000

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

SALUSRA WIDYA